

## Optimalisasi Sistem Administrasi Desa Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Rivai Ahmad<sup>1</sup>, Nazaruddin<sup>2</sup>, Fuady<sup>3</sup>, Muklis<sup>4</sup>, Onal Syahrizal<sup>5</sup>, Cut Putri Ellyana<sup>6</sup>, Zamzami<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Iskandar Muda, Indonesia

Received : 20 Desember 2025, Revised : 26 Desember 2025, Published : 15 Januari 2026

### Corresponding Author

Nama Penulis: Rivai Ahmad

E-mail: [rivai.unida@gmail.com](mailto:rivai.unida@gmail.com)

### Abstrak

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur yang belum optimal, serta kompleksitas pengelolaan administrasi publik. Tata kelola administrasi publik yang efektif dan efisien menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi publik di desa mitra melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, serta memperkuat pemahaman dan kapasitas aparatur desa. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, praktik langsung, dan dokumentasi kegiatan sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi publik, penerapan prinsip good governance, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi aktif perangkat desa dan masyarakat mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan desa. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berkontribusi positif dalam mewujudkan sistem administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata kunci** - tata kelola administrasi publik, pemerintahan desa, pengabdian kepada masyarakat, good governance, pemberdayaan aparatur desa

### Abstract

Villages, as the smallest administrative units, play a strategic role in supporting national development and improving community welfare. However, village administration still faces various challenges, such as limited resources, suboptimal capacity of officials, and the complexity of public administration management. Effective and efficient public administration governance is an important foundation for the realisation of transparent, accountable, and responsive village administration. This Community Service Activity aims to improve the quality of public administration governance in partner villages through a collaborative and participatory approach, as well as to strengthen the understanding and capacity of village officials. The implementation methods include lectures, hands-on practice, and activity documentation as a means of learning and evaluation. The results of the activities show an increase in the understanding and skills of village officials in public administration management, the application of good governance principles, and the optimisation of services to the community. The active participation of village officials and the community reflects a growing collective awareness of the importance of collaboration in village development. Overall, this PKM activity has made a positive contribution to the realisation of a more transparent, accountable, effective, and efficient village administration system, which is expected to have an impact on increasing the independence and welfare of the village community.

**Keywords** - public administration governance, village administration, community service, good governance, empowerment of village officials

**How To Cite :** Ahmad, R., Nazaruddin, N., Fuady, F., Muklis, M., Syahrizal, O., Ellyana, C. P., & Zamzami, Z. (2026). *Optimalisasi Sistem Administrasi Desa Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2973 - 2982. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.947>

**Copyright** ©2026 Rivai Ahmad, Nazaruddin Nazaruddin, Fuady Fuady, Muklis Muklis, Onal Syahrizal, Cut Putri Ellyana, Zamzami Zamzami

## PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa secara signifikan berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, seringkali desa dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur yang perlu ditingkatkan, serta kompleksitas dalam pengelolaan administrasi publik. Tata kelola administrasi publik yang efektif dan efisien menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Putra et al., 2024; Kalagison, 2025). Kualitas tata kelola administrasi publik di tingkat desa secara langsung memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem administrasi yang tertata dengan baik akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, mendukung perencanaan pembangunan yang partisipatif, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Sebaliknya, tata kelola administrasi yang lemah dapat memicu inefisiensi, potensi penyalahgunaan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Menyadari pentingnya tata kelola administrasi publik yang berkualitas di tingkat desa, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mewujudkannya. Kolaborasi yang sinergis antara akademisi, praktisi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan terutama partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya (Supriatno & Rozi, 2024). Melalui kolaborasi, transfer pengetahuan dan keterampilan, pendampingan teknis, serta pertukaran pengalaman dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Optimalisasi Sistem Administrasi Desa Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien" memiliki urgensi yang sangat signifikan dan relevan dengan konteks pembangunan desa saat ini. Urgensi ini didasarkan pada beberapa faktor krusial: Tuntutan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (*Good Governance*). Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya dan menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini menuntut adanya tata kelola administrasi publik yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Kualitas tata kelola ini menjadi prasyarat penting bagi efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* (Nasir, 2025; Khabib et al., 2024). Kesenjangan Kapasitas dan Sumber Daya Desa, banyak desa dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang administrasi publik, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap informasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola yang berkualitas. PKM ini hadir untuk menjembatani kesenjangan ini melalui transfer pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa.

Pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tata kelola administrasi publik yang baik akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. PKM ini mendorong kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik dalam kebijakan dan program pembangunan desa. Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan: Sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Iskandar Muda (UNIDA) memiliki tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Melalui PKM ini, tidak hanya menjalankan kewajibannya, tetapi juga berperan aktif sebagai agen perubahan dalam memberdayakan masyarakat desa. Keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh sivitas akademika UNIDA dalam bidang ilmu sosial dan politik, termasuk administrasi publik, dapat disalurkan untuk membantu mengatasi permasalahan konkret yang dihadapi oleh desa. Tata kelola administrasi publik yang berkualitas akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat desa. Sistem

administrasi yang efisien dan transparan akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan informasi publik. PKM ini berupaya untuk berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di tingkat desa. Kegiatan PKM ini sejalan dengan visi dan misi UNIDA yang berorientasi pada penguatan masyarakat dan pembangunan daerah. Melalui kontribusi nyata dalam meningkatkan tata kelola administrasi publik di desa, UNIDA menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. PKM terletak pada kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, mengatasi keterbatasan kapasitas dan sumber daya desa, mendorong partisipasi masyarakat, menjalankan peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merealisasikan visi dan misi universitas dalam pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun desa yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memiliki tujuan meningkatkan kualitas tata kelola administrasi publik di desa mitra melalui kolaborasi yang partisipatif dan berkelanjutan, sehingga terwujud pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan Pemahaman dan Kapasitas Aparatur Desa: Memberikan pemahaman mendalam dan meningkatkan keterampilan aparatur desa dalam berbagai aspek tata kelola administrasi public. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, kegiatan PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola administrasi publik yang berkualitas di desa mitra, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul ""Optimalisasi Sistem Administrasi Desa Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien"" yang dilaksanakan di Gampong Jruek Balee, salah satu desa (gampong) yang terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia, menggunakan beberapa tahapan pada pelaksanaan:

- a) Ceramah, metode ceramah menekankan pada sebuah pemberian materi pembelajaran dengan cara penuturan lisan (Dafid Fajar Hidayat, 2022). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim tidak hanya mengandalkan metode ceramah, akan tetapi Tim pelaksana juga menerapkan metode praktik yang mana metode praktik lebih produktif digunakan dari pada menggunakan metode pengajaran ceramah saja (Diva Hapsari et al., 2023).
- b) Dokumentasi, Dokumentasi merupakan salah satu cara atau prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh (Salim, 2022) data yang di dapat. Seperti berbentuk surat, catatan harian, arsip foto hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya (Belay, 2020). Dengan adanya dokumentasi akan mudah mencari informasi serta membuat laporan akhir

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gampong Jruek Balee adalah salah satu desa (gampong) yang terletak di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong ini berada dalam wilayah Mukim Jruek. Pada tahun 2025, Gampong Jruek Balee termasuk salah satu dari 52 gampong di Kabupaten Aceh Besar dalam hal pelayanan publik, Gampong Jruek Balee terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah gampong memberikan berbagai pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga, di antaranya: a). Administrasi Kependudukan: Pelayanan dokumen seperti surat keterangan domisili, pengantar KTP, KK, dan surat nikah dapat diakses langsung di kantor gampong dengan sistem yang lebih tertib dan responsif, b). Transparansi Dana Desa: Pemerintah gampong mengedepankan transparansi dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) yang telah disiapkan sejak awal tahun 2025, c). Layanan Sosial: Gampong Jruek Balee juga aktif dalam program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk bantuan untuk lansia, anak yatim, serta program ekonomi kreatif untuk UMKM lokal, d). Kesehatan dan Pendidikan: Masyarakat memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dasar melalui posyandu dan kerja sama dengan puskesmas kecamatan. Di bidang pendidikan, Gampong Jruek Balee mendukung kegiatan sekolah dan madrasah yang ada di wilayahnya, e). Partisipasi Masyarakat: Masyarakat Gampong Jruek Balee dilibatkan secara aktif dalam musyawarah

gampong (musdes) untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan layanan publik, menciptakan suasana demokratis dan inklusif.



**Gambar 1.** Pemaparan materi dari Tim PKM

Penguatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi publik yang transparan dan akuntabel memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hasil utama dari pelatihan ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola administrasi secara lebih tertib, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mereka menjadi lebih kompeten dalam hal pencatatan, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan keuangan, serta pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang lebih baik. Penguatan kapasitas ini berkontribusi pada terciptanya sistem administrasi desa yang lebih transparan dan akuntabel (Nasir, 2025; Parinduri & Situmeang, 2025). Aparatur desa menjadi lebih sadar akan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

Penguatan kapasitas ini bermuara pada peningkatan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelayanan publik menjadi lebih baik, cepat, dan responsif, sementara potensi terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir (Satria, 2020). Dengan tata kelola administrasi yang transparan dan akuntabel, pengelolaan sumber daya desa menjadi lebih efektif dan efisien, mengarah pada pembangunan desa yang lebih terarah dan berkelanjutan. Masyarakat pun merasakan manfaat nyata dari pemerintahan desa yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa merupakan hasil krusial dari upaya penguatan kapasitas dalam tata kelola administrasi publik yang transparan dan akuntabel (Angelina et al., 2025; Ramadhanti et al., 2024). Aparatur desa kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai esensi dan implementasi prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan desa. Hal ini menjadi landasan penting bagi terciptanya tata kelola yang baik. Selain pemahaman konseptual, aparatur desa juga mengalami peningkatan keterampilan teknis yang signifikan. Mereka menjadi lebih mahir dalam pengelolaan administrasi sehari-hari, termasuk dalam melakukan pencatatan yang akurat, pengarsipan dokumen yang sistematis, dan penyusunan laporan yang informatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguasaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa juga semakin meningkat, membekali mereka dengan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas.

Aparatur desa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang lebih partisipatif, melibatkan aspirasi masyarakat secara lebih efektif, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di tingkat desa. Tak kalah penting, kompetensi teknis mereka juga terasah, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk administrasi yang lebih efisien, pengelolaan data yang lebih baik, serta

penyediaan pelayanan publik yang lebih modern dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan keterampilan komunikasi dan pelayanan publik juga menjadi modal penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan responsif dengan warga desa (A. Putri et al., 2024; Tumanggor et al., 2025). Penguatan tata kelola administrasi desa menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Salah satu capaian utamanya adalah terciptanya sistem administrasi yang lebih tertib, terstruktur, dan akurat. Proses pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan menjadi lebih sistematis, meminimalisir kesalahan dan memudahkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Hal ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pengelolaan pemerintahan desa yang lebih profesional.

Penguatan tata kelola ini secara nyata meningkatkan transparansi dalam berbagai aspek krusial. Pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terbuka, dengan informasi mengenai anggaran, pendapatan, dan pengeluaran yang dapat diakses oleh masyarakat (Ngakil & Kaukab, 2020; Anggriani et al., 2019). Proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan juga menjadi lebih transparan, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pembangunan. Peningkatan transparansi ini beriringan dengan meningkatnya akuntabilitas aparatur desa. Mereka menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lebih terbuka untuk dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat atas kinerja mereka. Dampak positif lainnya adalah pengelolaan keuangan desa yang menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan sistem yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat, potensi terjadinya penyimpangan anggaran dapat diminimalisir. Keputusan-keputusan penting dalam pembangunan desa juga menjadi lebih berkualitas karena didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta terbuka. Selain itu, penguatan tata kelola administrasi desa juga mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Keterlibatan masyarakat ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Konsep dasar digitalisasi administrasi publik di desa memberikan landasan pemahaman yang esensial bagi aparatur desa dalam menghadapi era transformasi digital. Hasil utama dari sesi ini adalah terbangunnya pemahaman yang komprehensif mengenai definisi dan ruang lingkup digitalisasi administrasi publik, khususnya dalam konteks pemerintahan desa. Aparatur desa menyadari berbagai manfaat dan tujuan yang dapat dicapai melalui digitalisasi layanan publik, mulai dari peningkatan efisiensi, kemudahan akses, hingga penghematan sumber daya (Sabrang, 2025; Djafar, 2024). Diskusi mengenai tantangan dan peluang implementasi digitalisasi di tingkat desa juga membekali mereka dengan perspektif yang realistis dalam merencanakan dan melaksanakan inisiatif digital. Lebih jauh lagi, materi ini menekankan keterkaitan erat antara digitalisasi dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga digitalisasi dipandang bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih baik.



**Gambar 2.** Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian

Selain pemahaman teoritis, materi ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip layanan publik yang berkualitas sebagai tolok ukur keberhasilan digitalisasi. Aparatur desa memahami standar-standar pelayanan yang ideal, seperti sederhana, partisipatif, transparan, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Konsep *citizen-centric service* ditekankan untuk mengubah paradigma pelayanan menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan dan kemudahan warga. Materi ini juga memberikan

wawasan mengenai pentingnya pengukuran kualitas layanan publik dan bagaimana indikator keberhasilan digitalisasi dapat ditetapkan dan dievaluasi. Dengan pemahaman ini, aparat desa memiliki kerangka kerja untuk merancang layanan digital yang tidak hanya efisien tetapi juga memenuhi harapan masyarakat.

Konsep dasar digitalisasi administrasi publik di desa juga memberikan gambaran mengenai kerangka regulasi dan kebijakan yang relevan. Aparatur desa mendapatkan kebijakan nasional dan daerah terkait digitalisasi dan konsep *smart village* (Huda et al., 2020). Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa, informasi dan transaksi elektronik (ITE), serta perlindungan data pribadi menjadi krusial dalam memastikan implementasi digitalisasi dilakukan secara legal dan aman. Materi ini juga mendorong aparat desa untuk memiliki inisiatif dalam menyusun kebijakan digitalisasi di tingkat desa yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal, sehingga proses adopsi teknologi dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Teknologi dan aplikasi untuk digitalisasi administrasi desa memberikan pemahaman praktis kepada aparat desa mengenai berbagai solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik (Wahyunto et al., 2025; Wahyiah, 2025). Hasil utama dari sesi ini adalah dikenalkannya beragam platform dan aplikasi layanan publik digital yang relevan dengan kebutuhan desa. Aparatur desa menjadi familiar dengan konsep portal layanan desa terintegrasi yang dapat menjadi *single point of access* bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengajukan layanan, hingga menyampaikan pengaduan. Mereka juga memahami potensi aplikasi kependudukan dan catatan sipil digital dalam mempermudah pengelolaan data penduduk dan penerbitan dokumen penting. Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) dengan layanan publik juga ditekankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Selain itu, diperkenalkan pula aplikasi perizinan dan non-perizinan berbasis daring, platform pengelolaan aset desa secara digital, serta aplikasi pengelolaan surat menyurat dan arsip digital yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi administrasi. Pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi juga disoroti sebagai sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Pentingnya infrastruktur digital yang memadai sebagai fondasi keberhasilan digitalisasi di desa, aparat desa diajak untuk memahami kebutuhan dan perencanaan infrastruktur jaringan internet yang handal, termasuk pertimbangan teknis dan pembiayaannya. Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras seperti komputer, printer, dan scanner juga menjadi perhatian penting untuk memastikan operasional sistem digital berjalan lancar. Aspek keamanan siber dan perlindungan data dalam sistem digital desa juga ditekankan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital dan mencegah potensi penyalahgunaan data. Dengan pemahaman ini, aparat desa dapat merencanakan dan mengelola infrastruktur digital dengan lebih baik. Membekali aparat desa dengan pengetahuan mengenai pengelolaan dan analisis data layanan publik secara digital. Mereka memahami pentingnya pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data layanan yang terstruktur untuk memudahkan analisis. Materi ini juga menjelaskan bagaimana data yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang ada dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan. Konsep visualisasi data layanan publik juga diperkenalkan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk memahami kinerja layanan publik secara lebih mudah dan jelas. Dengan kemampuan mengelola dan menganalisis data, aparat desa dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di desa. Implementasi dan Pengelolaan Layanan Publik Digital di Desa memberikan panduan praktis bagi aparat desa dalam mewujudkan transformasi digital layanan publik (Wahyiah, 2025). Hasil utama dari sesi ini adalah pemahaman mengenai tahapan perencanaan dan pengembangan sistem layanan digital yang efektif. Aparatur desa dibekali dengan metodologi untuk mengidentifikasi jenis layanan yang paling prioritas untuk didigitalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya desa. Proses analisis kebutuhan pengguna, baik dari sisi masyarakat maupun aparat desa, ditekankan untuk memastikan sistem yang dibangun relevan dan mudah digunakan. Materi ini juga mengajarkan prinsip-prinsip desain alur proses layanan digital yang efisien, meminimalkan langkah-langkah birokrasi, serta memberikan panduan dalam memilih atau mengembangkan platform dan aplikasi yang paling sesuai dengan konteks desa.

Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan aparat desa. Pelatihan penggunaan aplikasi dan sistem digital menjadi krusial agar aparat desa mahir dalam mengoperasikan teknologi baru (Saleh et al., 2024). Pengembangan keterampilan teknis

dalam pengelolaan data dan pemahaman dasar keamanan siber juga ditekankan untuk memastikan data layanan aman dan terkelola dengan baik. Peningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan publik secara digital membekali aparatur desa dengan keterampilan komunikasi dan interaksi yang efektif melalui platform digital. Keberhasilan implementasi layanan digital juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, materi ini memberikan strategi sosialisasi layanan publik digital yang efektif kepada masyarakat, termasuk penggunaan berbagai saluran komunikasi yang relevan. Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi fokus penting agar warga dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Selain itu, materi ini menekankan pentingnya membangun mekanisme *feedback* dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan layanan digital, sehingga sistem yang ada terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan evaluasi dan monitoring layanan publik digital. Pengembangan indikator kinerja layanan publik digital menjadi penting untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari digitalisasi. Cara membangun mekanisme pengumpulan *feedback* dari pengguna secara sistematis, analisis data penggunaan layanan menjadi alat penting untuk mengidentifikasi masalah, tren, dan peluang peningkatan kualitas layanan. Hasil dari evaluasi dan monitoring ini kemudian dituangkan dalam laporan kinerja layanan publik digital sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan layanan selanjutnya. Aspek pendukung digitalisasi layanan publik desa menyoroti elemen-elemen eksternal dan internal yang krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif digitalisasi di tingkat desa (Hamim et al., 2024). Hasil utama dari sesi ini adalah pemahaman akan pentingnya kolaborasi dan kemitraan dalam mempercepat dan memperkaya proses digitalisasi. Aparatur desa menyadari bahwa menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga, seperti penyedia teknologi, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, dapat memberikan akses kepada keahlian, sumber daya, dan inovasi yang mungkin tidak tersedia di tingkat desa. Selain itu, materi ini menekankan nilai dari pembelajaran dan berbagi praktik baik antar desa yang telah lebih dulu berhasil dalam implementasi digitalisasi, sehingga desa dapat belajar dari pengalaman dan menghindari kesalahan yang sama.

Wawasan mendalam mengenai aspek keberlanjutan sistem digital yang telah dibangun. Aparatur desa memahami pentingnya perencanaan anggaran yang matang untuk pemeliharaan rutin dan pengembangan sistem di masa depan, termasuk alokasi dana untuk *update* perangkat lunak, perbaikan infrastruktur, dan dukungan teknis. Pengembangan kapasitas internal untuk pengelolaan sistem juga ditekankan agar desa tidak selalu bergantung pada pihak eksternal. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan teknis aparatur desa dalam mengelola, memelihara, dan bahkan mengembangkan sistem digital secara mandiri. Terakhir, materi ini menyoroti perlunya adaptasi yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknologi yang pesat, sehingga sistem layanan digital desa tetap relevan, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Dengan memahami dan merencanakan aspek-aspek pendukung ini, desa dapat memastikan investasi dalam digitalisasi memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas layanan publik di pemerintahan desa melalui digitalisasi administrasi ini disampaikan melalui berbagai metode pelatihan, seperti ceramah, diskusi, studi kasus, praktik langsung (demonstrasi aplikasi), dan kunjungan lapangan ke desa yang telah berhasil mengimplementasikan digitalisasi layanan publik. Tujuan akhirnya adalah membekali aparatur desa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.

Konsep dasar efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa memberikan fondasi pemahaman yang krusial bagi aparatur desa dalam upaya mewujudkan tata kelola yang optimal. Hasil utama dari sesi ini adalah terbangunnya pemahaman yang jelas mengenai definisi dan perbedaan antara efektivitas, yaitu pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan, serta efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya yang minimal untuk mencapai hasil maksimal. Aparatur desa menyadari betapa pentingnya kedua konsep ini dalam konteks pemerintahan desa, di mana sumber daya seringkali terbatas namun tuntutan pelayanan publik terus meningkat. Mereka memahami bahwa pemerintahan yang efektif dan efisien akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, seperti pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang tepat sasaran, dan pengelolaan anggaran yang optimal. Memperkenalkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai kerangka kerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi (Nabila et al., 2025; Yuliono & Ngumar, 2019). Aparatur desa memahami bagaimana prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, responsivitas, efisiensi dan efektivitas itu sendiri, serta kesetaraan dan inklusivitas

saling terkait dan berkontribusi pada optimalisasi administrasi desa. Mereka menyadari bahwa implementasi prinsip-prinsip ini bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga kunci untuk menciptakan sistem administrasi yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa, materi ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi melalui penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) secara optimal, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pentingnya pengendalian internal dan audit keuangan desa. Pemanfaatan teknologi untuk analisis dan pelaporan keuangan juga disoroti untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat (Saddam, 2025). Perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif dan berbasis kebutuhan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang efektif, penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang realistis dan terukur, serta pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran.

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme perangkat desa. Hasil utama dari sesi ini adalah meningkatnya kompetensi aparatur desa dengan menggunakan alat ukur kemampuan dan pemahaman melalui pre-test dan post-test serta penilaian dokumen kerja. Pelatihan teknis membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan desa. Selain itu, pelatihan *soft skills* seperti komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang visioner, dan kerjasama tim yang solid juga diberikan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal dan manajerial aparatur desa. Kegiatan studi banding ke desa-desa yang telah berhasil menerapkan sistem administrasi yang baik memberikan wawasan praktis dan inspirasi untuk melakukan inovasi di desa sendiri. Pentingnya peningkatan disiplin dan etos kerja sebagai fondasi pemerintahan desa yang efektif dan efisien Putri & Utama, 2024). Penegakan aturan dan kode etik aparatur desa secara konsisten menanamkan kesadaran akan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Sistem pemberian penghargaan bagi aparatur yang berprestasi dan pemberian sanksi yang proporsional bagi pelanggaran diharapkan dapat memotivasi kinerja yang lebih baik dan menciptakan lingkungan kerja yang adil. Pada akhirnya, materi ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sehingga aparatur desa dapat melayani masyarakat dengan lebih baik dan berkontribusi secara maksimal pada pembangunan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul Optimalisasi Sistem Administrasi Desa Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien secara keseluruhan berhasil mencapai tujuannya dalam memberdayakan perangkat desa dan masyarakat menuju tata kelola administrasi publik yang lebih baik. Melalui serangkaian materi pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, kegiatan ini telah meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam berbagai aspek penting administrasi publik, mulai dari konsep dasar, optimalisasi proses, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan kualitas interaksi dan komunikasi pelayanan. Partisipasi aktif perangkat desa dan masyarakat dalam setiap sesi menunjukkan adanya antusiasme dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam membangun desa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip *good governance*, standardisasi prosedur, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem administrasi desa yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. PKM ini telah meletakkan fondasi yang kuat untuk mewujudkan tata kelola administrasi publik yang berkualitas di desa. Kolaborasi yang terjalin antara tim pengabdian, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Diharapkan, hasil dari pengabdian ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan evaluasi berkala akan sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang dari inisiatif ini. Beberapa saran untuk pengembangan dan keberlanjutan kegiatan serupa di masa mendatang, yaitu a). Program pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan perlu dipertimbangkan, b).

Peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, c). Pemanfaatan Teknologi yang Lebih Optimal, sesi PKM selanjutnya dapat berfokus pada implementasi langsung solusi digital sederhana yang sesuai dengan konteks desa. Tim pengabdian dapat memberikan pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi atau platform tertentu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Tim Redaksi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka yang memberikan kesempatan untuk menerbitkan didalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Binneka, serta kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan PKM terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, G., Siagian, J., Sarjana, P., Ekonmi, F., & Sumatera, U. (2025). *Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan*. 1(2), 163–172.
- Anggriani, N., Sukabumi, M., Nurodin, I., Sukabumi, M., Iskandar, D., Sukabumi, M., & Desa, B. (2019). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. 13(2), 134–145.
- Belay, B. S. (2020). Peranan Orang Tua Dalam Membina Sikap (Attitude) Anak Di Desa Hiligito Kecamatan Fanayama Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 2003–2005. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v2i1.345>
- Daqid Fajar Hidayat. (2022). Desain Metode Ceramah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(2), 141–156. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i2.300>
- Diva Hapsari, Y., Andani Rahmawati, S., Amelia Sani, F., Pramudya Baskoro, A., Nadia, S., & Lestari, R. (2023). Pengaruh Metode Pembelajaran Praktek dan Ceramah pada Pembelajaran Seni Kelas III SD 6 BulungKulon. *Jurnal Ilmiah Profesi Guru (JIPG)*, 4(2), 137–145. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/jipg/index>
- Djafar, M. F. (2024). *Maksimalisasi Penggunaan Aplikasi Digital Dalam Menunjang Administrasi Perangkat Desa Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. 4(1), 300–305.
- Hamim, R. N., Meidiana, A., & Helmi, C. (2024). *Dampak Implementasi Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik di Desa Sukajaya*. 3, 1–16.
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). *Pengembangan Desa Berbasis Smart Village ( Studi Smart Governance pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang )*. 6, 539–556.
- Kalagison, M. D. (2025). *Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom*. 5(2). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1312>
- Khabib, M., Ma, A., Rahman, A. Z., Ananda, A., & Fauzi, I. (2024). *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. 4(November).
- Nabila, P., Maulina, I., Islam, U., Sultanah, N., Lhokseumawe, N., Governance, G., & Kinerja, A. (2025). *Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance*. 5(1), 1–10.
- Nasir, M. (2025). *Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa*. 4(3), 468–478.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. 3(2), 92–107.
- Parinduri, R. Y., & Situmeang, M. (2025). *Penguatan Tata Kelola Desa Wisata melalui Digitalisasi Administrasi, Literasi Akuntansi, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Agrowisata Paloh Naga Pantai Labu Strengthening Village Tourism Governance through Administrative Digitalization, Accounting Literacy, and Community Economic Empowerment at Paloh Naga Agrotourism, Labu Beach Journal Liaison Academia and Society ( J-LAS )*. 4, 110–122.
- Putra, S. J., Devi, D., Mandini, S., & Rahmandari, I. A. (2024). *Untuk Perangkat Desa Bentek Oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram [ Village Governance Training for Village Officials in Bentek Village by the Government Science Study Program at 45 Mataram University ]*. 12–20.
- Putri, A., Choiriyati, S., Meiranti, M., Lampung, U. M., Lampung, U. M., & Lampung, U. M. (2024). *Pola Komunikasi Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat Studi Pada Tiyuh Mekar*

- Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat asal-usul dan adat istiadat yang dihormati dalam sistem pemerintahan nasional . *Desa*. 13, 143–168.
- Putri, A. S., & Utama, L. S. (2024). *Strategi Peningkatan Kedisiplinan Aparat Desa Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan*. 01(2), 24–35.
- Ramadhanti, R., Emharis, E., Andri, A., Muharram, S., Anggraini, T., Islam, U., Singingi, K., Nenas, K., Kuantan, T., Desa, P., & Desa, A. (2024). *Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan administrasi desa di desa pangkalan indarung kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi*. 4, 220–229.
- Sabrang, D. (2025). *Smart Desa , Layanan Cerdas : Inovasi Digitalisasi Pelayanan Administrasi*.
- Saddam, M. (2025). *Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan*. 3, 1–6.
- Salah, A., Musa, H., Rahman, A., & Saputra, A. (2024). *Pemberdayaan Aparat Desa Palakka melalui Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Desa*. 4(3).
- Salim, A. S. (2022). Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan DI SMAN 1 Baitussalam Aceh Besar(Vol. 3, p. 1).
- Satria, H. (2020). *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik*. 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Supriatno, E., & Rozi, A. (2024). *Kolaborasi Pentahelix dalam Program KKN: Sinergi Menuju Pembangunan Desa Mandiri ( Studi Kasus di Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik , Kabupaten Pandeglang ) Abstrak*. 4, 296–309.
- Tumanggor, T., Kholil, S., Negeri, I., Utara, S., Serdang, K. D., & Utara, P. S. (2025). *Reformasi Sistem Komunikasi Organisasi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Abstrak*. 6(2), 1381–1391.
- Wahyiah, I. R. (2025). *Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa : Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja*. 8(2), 832–849.
- Wahyunto, E., Taufiqi, M. A., Azizah, N., & Maryam, N. S. (2025). *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Administrasi Desa*. 03(03), 359–363.
- Yuliono, R. N., & Ngumar, S. (2019). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam*.